



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR : KEP/1030 / VII /2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN
PROGRAM LEGISLASI BIDANG PERTAHANAN TAHUN 2025**

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan Program Legislasi Bidang Pertahanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Bidang Pertahanan Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 - 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Bidang Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1046);
 - 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 612);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI BIDANG PERTAHANAN TAHUN 2025.**

KESATU ...

- KESATU : Menyetujui Penetapan Program Legislasi Bidang Pertahanan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertahanan dibebankan pada anggaran masing-masing Satker yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Irjen Kemhan
 2. Rektor Unhan
 3. Asrenum Panglima TNI
 4. Dirjen Kemhan
 5. Kabadan Kemhan
 6. Kababinkum TNI
 7. Kapus Kemhan
 8. Karo Setjen Kemhan.
- Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pertahanan RI
 2. Panglima TNI
 3. Wamenhan RI
 4. Kasad
 5. Kasal
 6. Kasau.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2024



a.a. Menteri Pertahanan RI
P.P. Sekretaris Jenderal,

Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P.

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI BIDANG PERTAHANAN T.A. 2025

NO.	JUDUL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	SATKER/SUBSATKER/ PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.	BIRO TURDANG SETJEN KEMHAN	
2.	RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Bidang Pertahanan.	BIRO TURDANG SETJEN KEMHAN	
3.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan.	BIRO TURDANG SETJEN KEMHAN	
4.	RPP tentang Pesawat Udara Negara.	BIRO TURDANG SETJEN KEMHAN	
5.	RPP tentang Tugas Bantuan TNI dalam Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
6.	RPP tentang Tugas Bantuan TNI Kepada Pemerintah Daerah.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
7.	RPP tentang Tugas TNI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
8.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
9.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan Wilayah Udara.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
10.	RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.	DITJEN POTHAN KEMHAN	
11.	RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 115 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Tahun 2020-2024.	DITJEN POTHAN KEMHAN	

1	2	3	4
12.	RPerpres tentang Rencana Strategis Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.	DITJEN POTHAN KEMHAN	
13.	RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 136 Tahun 2014 tentang Program Pengembangan Pesawat IF-X.	DITJEN POTHAN KEMHAN	
14.	RPerpres tentang Rencana Induk Industri Pertahanan	DITJEN POTHAN KEMHAN	
15.	RPermenhan tentang Hukuman Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).	BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN KEMHAN	
16.	RPermenhan tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pindah Antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.	BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN KEMHAN	
17.	RPermenhan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan.	BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN KEMHAN	
18.	RPermenhan tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kemhan.	BIRO TU DAN PROTOKOL SETJEN KEMHAN	
19.	RPermenhan tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan.	BIRO TURDANG SETJEN KEMHAN	
20.	RPermenhan tentang Sistem Pengelolaan Kebijakan Strategi Pertahanan Negara.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
21.	RPermenhan tentang Interoperability Kebijakan Pengerahan Komponen Utama (TNI), Komponen Cadangan, Komponen Pendukung dalam Pertahanan Militer.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
22.	RPermenhan tentang Mekanisme Pendidikan bagi siswa negara sahabat di Lingkungan Kemhan dan TNI.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	

1	2	3	4
23.	RPermenhan tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerimaan Tamu Luar Negeri di Lingkungan Kemhan.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
24.	RPermenhan tentang Pengerahan Organisasi TNI dan Alutsista dalam Mendukung Tugas Operasi di Daerah.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
25.	RPermenhan tentang Perubahan atas Permenhan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia dalam Pengamanan Perbatasan.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
26.	RPermenhan tentang Pedoman Penanganan Ancaman Nonmiliter.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
27.	RPermenhan tentang Kebijakan Pengerahan TNI dalam Operasi Bantuan Kemanusiaan di Luar Negeri.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
28.	RPermenhan tentang Pelaksanaan Kebijakan, Strategi dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
29.	RPermenhan tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja di Lingkungan Kemhan dan TNI.	DITJEN RENHAN KEMHAN	
30.	RPermenhan tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran di Lingkungan Kemhan dan TNI.	DITJEN RENHAN KEMHAN	
31.	RPermenhan tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pakaian Seragam, Atribut dan Kelengkapan Kader Bela Negara.	DITJEN POTHAN KEMHAN	
32.	RPermenhan tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.	DITJEN POTHAN KEMHAN	
33.	RPermenhan tentang Pengelolaan Cadangan Material Strategis Komponen Pendukung Pertahanan Negara.	DITJEN POTHAN KEMHAN	

1	2	3	4
34.	RPermenhan tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian Sesuai dengan Profesi.	DITJEN POTHAN KEMHAN	
35.	RPermenhan tentang Kepangkatan Anggota Komponen Cadangan Pertahanan Negara.	DITJEN POTHAN KEMHAN	
36.	RPermenhan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Komponen Pendukung untuk Pertahanan Negara.	DITJEN POTHAN KEMHAN	
37.	RPermenhan tentang Amandemen Cost Share KFX.	DITJEN POTHAN KEMHAN	
38.	RPermenhan tentang Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pengawasan serta Perhitungan TKDN Alpalhankam.	DITJEN POTHAN KEMHAN	
39.	RPermenhan tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembinaan Rumah Negara Tipe Rumah Susun di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.	DITJEN KUATHAN KEMHAN	
40.	RPermenhan tentang Bekal Pokok Munisi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.	DITJEN KUATHAN KEMHAN	
41.	RPermenhan tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.	DITJEN KUATHAN KEMHAN	
42.	RPermenhan tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyaluran Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang akan Memasuki Masa Persiapan Pensiun.	DITJEN KUATHAN KEMHAN	
43.	RPermenhan tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kemhan.	DITJEN KUATHAN KEMHAN	
44.	RPermenhan tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penyusutan dan Penghapusan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.	DITJEN KUATHAN KEMHAN	

1	2	3	4
45.	RPermenhan tentang Kebutuhan, Larangan dan Batasan Penggunaan Amunisi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.	DITJEN KUATHAN KEMHAN	
46.	RPermenhan tentang Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.	DITJEN POTHAN KEMHAN	
47.	RPermenhan tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.	DITJEN KUATHAN KEMHAN	
48.	RPersekjen tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kemhan	RORENKU SETJEN KEMHAN	
49.	RPersekjen tentang Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan untuk Pertahanan Negara di Lingkungan Kemhan.	RORENKU SETJEN KEMHAN	
50.	RPersekjen tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal Renja di Lingkungan Kemhan.	RORENKU SETJEN KEMHAN	
51.	RPersekjen tentang Tata Cara Penyusunan Renstra di Lingkungan Kemhan.	RORENKU SETJEN KEMHAN	
52.	RPersekjen tentang Tata Cara Penyusunan Renja di Lingkungan Kemhan.	RORENKU SETJEN KEMHAN	
53.	RPersekjen tentang Tata Cara Penyusunan Revisi Anggaran di Lingkungan Kemhan.	RORENKU SETJEN KEMHAN	
54.	RPersekjen tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian <i>Security Clearance</i> di Lingkungan Kementerian Pertahanan.	BIRO UMUM SETJEN KEMHAN	
55.	RPersekjen tentang Pengamanan VIP dan Protokoler Kemhan RI.	BIRO UMUM SETJEN KEMHAN	
56.	RPersekjen tentang Pengamanan Personel dan Materil.	BIRO UMUM SETJEN KEMHAN	

57. RPersekjen ...

1	2	3	4
57.	RPersekjen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Senjata Berat.	PUSLAIK KEMHAN	
58.	RPersekjen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Tempur.	PUSLAIK KEMHAN	
59.	RPersekjen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Kapal Selam Pertahanan.	PUSLAIK KEMHAN	
60.	RPersekjen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Senjata Udara untuk Mendukung Pertahanan Negara.	PUSLAIK KEMHAN	
61.	RPersekjen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan <i>Radio Detection and Ranging</i> (Radar) untuk Mendukung Pertahanan Negara.	PUSLAIK KEMHAN	
62.	RPersekjen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan <i>Unmanned Aerial System</i> (UAS) untuk Mendukung Pertahanan Negara.	PUSLAIK KEMHAN	
63.	RPersekjen tentang Layanan Pusat Data.	PUSDATIN KEMHAN	
64.	RPersekjen tentang Jaringan Intra Kementerian Pertahanan.	PUSDATIN KEMHAN	
65.	RPersekjen tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik Kementerian Pertahanan.	PUSDATIN KEMHAN	
66.	RPerirjen tentang Perubahan Atas Perirjen Nomor 21 Tahun 2015 tentang Reviu Laporan Keuangan di Lingkungan Kemhan dan TNI.	ITJEN KEMHAN	
67.	RPerirjen tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa.	ITJEN KEMHAN	
68.	RPerirjen tentang Pedoman <i>Probitiy Audit</i> Pengadaan.	ITJEN KEMHAN	
69.	RPerirjen tentang Tata Cara Asistensi dan/atau Pendampingan di lingkungan Kemhan dan TNI.	ITJEN KEMHAN	

1	2	3	4
70.	RPerirjen tentang Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemhan.	ITJEN KEMHAN	
71.	RPerirjen tentang Tata Cara Evaluasi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kemhan.	ITJEN KEMHAN	
72.	RPerirjen tentang Tata Cara Pemantauan dalam Pengawasan Intern di Lingkungan Kemhan dan TNI.	ITJEN KEMHAN	
73.	RPerirjen tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan BMN di Lingkungan Kemhan dan TNI.	ITJEN KEMHAN	
74.	RPerrektor tentang Perubahan Atas Perrektor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Audit Mutu Internal.	UNHAN	
75.	RPermenhan tentang Penyiapan Alumni S-1/D-3 Unhan RI menjadi Pa PK TNI	UNHAN	
76.	RPerrektor Unhan RI tentang Proses Mekanisme Hubungan Kerja antara LPPN dengan Subsatker Unhan RI lainnya	UNHAN	
77.	RPerrektor tentang Pedoman Kehidupan Kadet Mahasiswa	UNHAN	
78.	RPerrektor tentang Logo dan Sertifikat Kompetensi Lembaga Sertifikasi Unhan RI	UNHAN	
79.	RPerrektor Tentang Pelaksanaan Penetapan Narasumber SGD, FGD, dan RTD	UNHAN	
80.	RPerrektor tentang Tata Cara Pendidikan Profesi Dokter, Apoteker, dan Insinyur	UNHAN	
81.	RPerrektor tentang Pelaksanaan PKM Pascasarjana	UNHAN	
82.	RPerrektor Pelaksanaan Ujian Prelium dan Komprehensif Pascasarjana	UNHAN	
83.	RPerrektor tentang Pelaksanaan Sidang Promosi Terbuka	UNHAN	

84. RPerrektor ...

1	2	3	4
84.	RPerrektor tentang Kehidupan Kadet saat Pendidikan Profesi	UNHAN	
85.	RPerdirjen Strahan Kemhan tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kopetensi Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
86.	RPerdirjen Strahan Kemhan tentang Kurikulum Diklat Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara.	DITJEN STRAHAN KEMHAN	
87.	RPerdirjen tentang Perubahan Atas Perdirjen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis di Lingkungan Kemhan dan TNI.	DITJEN RENHAN KEMHAN	
88.	RPerdirjen tentang Perubahan Atas Perdirjen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Kemhan dan TNI.	DITJEN RENHAN KEMHAN	
89.	RPerdirjen tentang Perubahan Atas Perdirjen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja di Lingkungan Kemhan dan TNI.	DITJEN RENHAN KEMHAN	
90.	RPerdirjen tentang Perubahan Atas Perdirjen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penelaahan Rancangan Rencana Kerja di Lingkungan Kemhan dan TNI.	DITJEN RENHAN KEMHAN	
91.	RPerdirjen tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran di Lingkungan Kemhan dan TNI.	DITJEN RENHAN KEMHAN	
92.	RPerdirjen tentang Standardisasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kemhan dan TNI.	DITJEN RENHAN KEMHAN	
93.	RPerdirjen tentang Perubahan Atas Perdirjen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemhan dan TNI.	DITJEN RENHAN KEMHAN	
94.	RPerdirjen tentang Perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri TA.2025.	DITJEN POTHAN KEMHAN	

1	2	3	4
95.	RPerkabaranaan tentang Petunjuk Pelaksana Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Badan Sarana Pertahanan.	BARANAHAN KEMHAN	
96.	RPerkabadiklat tentang SOP Penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara.	BADIKLAT KEMHAN	
97.	RPerkabadiklat tentang Metode Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan.	BADIKLAT KEMHAN	
98.	RPerkabadiklat tentang Alat Instruksi dan Alat Penolong Instruksi di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan.	BADIKLAT KEMHAN	
99.	RPerkabadiklat tentang SOP Prosedur Penjaminan Mutu di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan.	BADIKLAT KEMHAN	
100.	RPerkabainstrahan Pengelolaan Informasi Strategis Pertahanan.	BAINSTRAHAN KEMHAN	
101.	RPerkabainstrahan Perkembangan Lingkungan Strategis.	BAINSTRAHAN KEMHAN	



an Menteri Pertahanan RI
P.P. Sekretaris Jenderal,

[Signature]
Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P.